

**DAMPAK IMPLEMENTASI PROGRAM  
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA  
TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT  
(Studi di Desa Sumberjo Kecamatan Kandat  
Kabupaten Kediri)**

**Tuwis Hariyani**

Dosen Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kahuripan Kediri

**Abstrak**

Secara kasat mata tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kondisi atau kepemilikan rumahnya, sehingga dapat dikatakan kondisi masyarakat Indonesia belum semuanya sejahtera. Dimana bila dilihat dari kepemilikan rumahnya maka masih banyak warga yang menempati rumah yang kurang atau bahkan tidak layak huni, terutama di daerah perdesaan. Mereka sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk bisa memiliki hunian yang layak, karena rata-rata warga miskin itu memiliki tingkat penghasilan rendah, sehingga tidak semua kebutuhan dasar hidupnya dapat terpenuhi secara layak, khususnya bidang perumahan karena dibutuhkan dana yang cukup besar bagi mereka untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat suatu program yang berorientasi pada pembangunan rumah tidak layak huni yaitu Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, yang bertujuan untuk memberdayakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman. Desa Sumberjo merupakan salah satu desa

di wilayah Kabupaten Kediri yang menjadi desa sasaran Program BPS dan mendapatkan bantuan paling besar dibandingkan dengan desa lain di wilayah Kabupaten Kediri untuk tahun anggaran 2015. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis: (1) implementasi program, (2) faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program, (3) dampak implementasi program terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis model interaktif dari Miles, *et.al.*, serta teori implementasi kebijakan model Merilee S. Grindle, maka keberhasilan implementasi kebijakan dilihat dari tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri yang terdiri dari *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of policy* yaitu lingkungan dimana kebijakan itu diimplementasikan.

**Kata kunci:** dampak implementasi kebijakan, bantuan stimulan perumahan swadaya, kesejahteraan masyarakat

## A. PENDAHULUAN

Sebagai negara sedang berkembang Indonesia masih belum luput dari masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan atau kondisi seseorang yang mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, yang disebabkan oleh karena kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan atau sulitnya untuk mengakses pendidikan dan kesehatan. Karena miskin akhirnya tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup, sehingga hidupnya tidak sejahtera.

Tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah pada dasarnya dapat dilihat secara kasat mata dari keberadaan dan kepemilikan rumahnya, sehingga biasanya program pengentasan kemiskinan suatu daerah salah satu barometernya dinilai dari kepemilikan rumah masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah di manapun di Indonesia, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya selalu berupaya mengalokasikan dana untuk peningkatan kualitas rumah warganya agar mereka bisa memiliki rumah yang layak untuk dihuni dan hidupnya lebih sejahtera.

Saat ini ketersediaan rumah layak huni menjadi isu penting karena pembangunan infrastruktur perumahan di Indonesia masih belum merata padahal wilayah Indonesia sangat luas, dan masyarakat miskin masih sangat berharap untuk mendapatkan bantuan dan perhatian pemerintah untuk

dapat memiliki hunian yang layak. Sehingga sudah seharusnya pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu karena mereka adalah rakyat Indonesia juga yang pantas untuk diberikan kesejahteraan. Sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan.”

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membuat suatu program yang berorientasi pada pembangunan perumahan yaitu Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang diatur oleh Peraturan Menteri PUPR Republik Indonesia Nomor 39/PRT/M/2015. Tujuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah supaya mereka mampu untuk membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya secara swadaya sehingga bisa menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Desa Sumberjo merupakan salah satu desa di Kabupaten Kediri yang telah dinyatakan layak dan mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian PUPR pada tahun 2015, dengan penerima bantuan sebanyak 70 orang dan merupakan desa dengan jumlah penerima bantuan terbanyak untuk wilayah Kabupaten Kediri bila dibandingkan dengan desa lainnya yang hanya sekitar 15 sampai 35 orang penerima bantuan. Namun dalam implementasi program tersebut terdapat beberapa kendala sehingga mempengaruhi keberhasilan implementasi program. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis (1) implementasi Program Bantuan Stimulan Swadaya di Desa Sumberjo, (2) faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sumberjo, (3) dampak implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pertimbangan yang mendasari penggunaan pendekatan ini adalah karena pendekatan kualitatif sering digunakan dalam bidang sosiologi,

psikologi, dan manajemen. Dalam tingkat yang fundamental pendekatan tersebut bertujuan mendapatkan makna, esensi, persepsi, dan pendapat dari orang-orang yang dijadikan sumber data untuk menggambarkan secara tepat suatu fenomena. Penelitian ini berupaya untuk memberikan deskripsi umum secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai implementasi Program Bantuan Stimulan Swadaya serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program tersebut di Desa Sumberjo.

Agar penelitian terhindar dari data yang tidak relevan dengan masalah dan tujuan penelitian, sekaligus membatasi agar permasalahan tidak melebar, maka dibutuhkan fokus penelitian. Adapun penelitian ini difokuskan pada:

1. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dengan memakai teori Implementasi Kebijakan Publik Model Merilee S. Grindle maka keberhasilan implementasi kebijakandilihat dari tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari:
  - 1) *Content of Policy* yang meliputi:
    - a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi.
    - b. Tipe manfaat.
    - c. Derajat perubahan yang ingin dicapai.
    - d. Letak pengambilan keputusan.
    - e. Pelaksana program.
    - f. Sumberdaya yang digunakan.
  - 2) *Context of Policy* yang meliputi:
    - a. Kekuasaan,kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat.
    - b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa.
    - c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.
2. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.
3. Dampak implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data didasarkan pada kriteria *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Sedangkan analisis data menggunakan analisis Model Interaktif dari Miles, *et. al.* yang meliputi kegiatan kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Program**

Keberhasilan implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari segi *content of policy* dipengaruhi oleh:

- a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, diantaranya adalah kepentingan dari Pemerintah Kabupaten, kepentingan dari Kepala Desa, kepentingan dari Fasilitator, dan kepentingan dari Penerima Bantuan.
- b. Tipe manfaat, adapun manfaat atau dampak positif dari pelaksanaan Program BSPS ini bagi penerima bantuan diantaranya yaitu: mengurangi beban hidup masyarakat miskin penerima bantuan, meningkatkan rasa percaya diri mereka, meningkatkan taraf hidup mereka, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat penerima bantuan, memberikan rasa aman, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin penerima BSPS.
- c. Derajat perubahan yang ingin dicapai, pada implementasi Program BSPS ini maka derajat perubahan yang ingin dicapai adalah sebagaimana tujuan dibuatnya program ini yaitu memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman. Dimana ukuran minimum keswadayaan dari penerima bantuan adalah berupa tenaga kerja dan bahan bangunan lama yang masih layak huni. Sedangkan ukuran/kriteria rumah yang layak huni adalah memenuhi kecukupan luas, kualitas, dan kesehatan bangunan. Karena derajat perubahan yang ingin dicapai memiliki ukuran yang jelas dan realistis, maka dapat berhasil dilaksanakan sehingga mendukung keberhasilan program ini.
- d. Letak pengambilan keputusan. Pada kebijakan ini terletak di tingkat kementerian jadi sifatnya adalah “*top down*”, namun agar kebijakan ini dapat terimplementasikan dengan baik, maka ada tahapan penyiapan masyarakat yang bertujuan untuk memperkuat tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan BSPS.
- e. Pelaksana program, dimana dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung oleh adanya pelaksana kebijakan yang

kompeten dan kapabel demi keberhasilan kebijakan tersebut. Adapun pelaksana program yang memiliki kompetensi dan kapabilitas yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Program BSPS diantaranya SKPD, Kepala Desa, toko penyedia bahan bangunan, dan fasilitator.

- f. Sumberdaya yang digunakan. Adapun sumberdaya yang digunakan meliputi sumberdaya manusia, waktu, dan materi. Dalam pelaksanaan Program BSPS ini, kurang didukung oleh sumber daya yang memadai, sehingga dalam proses pelaksanaan program mengalami beberapa kendala. Semua dimulai dari waktu pelaksanaan program yang sangat terbatas, sehingga masyarakat penerima bantuan kurang kesiapan dalam hal swadaya, yaitu keterbatasan dana swadaya, dan keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini ketersediaan pekerja (tukang).

Dari segi *Context of Policy*, maka keberhasilan implementasi Program BSPS juga dipengaruhi oleh lingkungan dimana kebijakan itu diimplementasikan, yaitu:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat. Dengan keterbatasan waktu pelaksanaan program, maka sangat dibutuhkan strategi dan pengaruh yang cukup besar dari para pejabat/penguasa dimana program ini diimplementasikan agar masyarakat penerima bantuan dapat segera melaksanakan pembangunan. Dalam hal ini aktor yang dimaksud adalah dari SKPD, Camat dan Kepala Desa. Selain itu juga dipengaruhi kepentingan-kepentingan, dalam hal ini adalah kepentingan Pemerintah Kabupaten terkait keberlanjutan program maupun kepentingan pribadi dari Kepala Desa dan Fasilitator.
- b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Lembaga yang dimaksud adalah Pemerintahan Desa Sumberjo, yaitu Kepala Desa dan jajaran perangkatnya memiliki kepedulian yang cukup baik terhadap penerima bantuan dan sangat kompak di dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan Program BSPS.
- c. Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana. Khususnya kepatuhan dari penerima bantuan, dimana penerima bantuan yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi akan memberikan respon yang bagus terhadap kebijakan BSPS ini, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan demikian pula sebaliknya bila kepatuhannya

rendah maka responnya kurang bagus sehingga terlambat dalam penyelesaian pembangunan.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mendukung**

Berdasarkan hasil implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sumberjo, dari segi *content of policy*, maka faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan program, diantaranya adalah:

### **a. Adanya Kepentingan yang Mempengaruhi**

Sebagaimana yang diungkapkan Grindle (1980) dalam Agustino (2014:154) bahwa “suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, maka hal itulah yang perlu diketahui lebih lanjut”. Kepentingan disini adalah kepentingan dari Pemerintah Kabupaten (SKPD) dan Kepala Desa yang memiliki kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu juga kepentingan yang terkait dengan keberlanjutan program. Selain itu bagi Kepala Desa keberhasilan program ini akan memberikan memberikan citra yang baik terhadap dirinya. Selain itu, kepentingan dari fasilitator dimana fasilitator berusaha menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkin, sehingga menunjukkan kinerja yang bagus dengan harapan akan dijadikan pertimbangan untuk diusulkan lagi sebagai fasilitator pada program berikutnya. Dan yang paling penting adalah adanya kepentingan pribadi dari penerima bantuan yaitu dimilikinya rumah yang layak huni. Sebagaimana pendapat Agustino (2014:159) yang menyatakan: “seseorang atau kelompok orang sering memperoleh keuntungan langsung dari suatu proyek implementasi kebijakan, maka dari itu dengan senang hati mereka akan menerima, mendukung dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan.”

### **b. Tipe Manfaat**

Manfaat atau dampak positif dari program ini merupakan faktor yang turut mendukung keberhasilan implementasi Program BSPS di Desa Sumberjo. Adapun implementasi program BSPS ini berdasarkan data yang peneliti dapatkan maka program ini memberikan dampak



yang positif bagi penerima bantuan. Hal itu sesuai dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle (1980) dalam Agustino (2014:155) bahwa “dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian suatu kebijakan”. Adapun manfaat atau dampak positif dari implementasi program ini bagi penerima bantuan adalah: (1) mengurangi beban hidup masyarakat miskin, karena mereka tidak lagi memiliki tanggungan untuk membuat rumah, (2) Secara psikologis meningkatkan rasa percaya diri karena rumahnya lebih bagus dari sebelumnya, (3) meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin karena penghasilan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan membangun rumah bisa dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup lainnya, (4) dengan kondisi rumah yang memenuhi kriteria rumah layak huni, maka akan meningkatkan kualitas kesehatan, dan (5) memberikan rasa aman bagi penghuninya, (6) mewujudkan Ketahanan Ekonomi, (7) meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan.

Ketika para pelaku BSPS khususnya penerima bantuan sadar akan manfaat atau dampak positif program ini bagi kehidupan mereka, maka secara otomatis mereka akan mendukung keberhasilan program ini. Hal itu sesuai dengan pendapat Agustino (2014:158) yang menyatakan: “dalam masyarakat yang digerakkan oleh pilihan-pilihan yang rasional, maka banyak dijumpai bahwa individu/ kelompok warga mau menerima dan melaksanakan kebijakan publik sebagai sesuatu yang logis, rasional, serta memang dirasa perlu.”

c. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai

Derajat perubahan yang ingin dicapai pada implementasi suatu kebijakan juga turut menjadi faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Karena derajat perubahan yang ingin dicapai pada implementasi program ini memiliki ukuran yang jelas dan realistis sehingga derajat perubahan yang diharapkan dapat tercapai. Adapun derajat perubahan yang ingin dicapai dalam implementasi program ini adalah sebagaimana tujuan dibuatnya program BSPS ini yaitu untuk memberdayakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak



dalam lingkungan yang sehat dan aman. Hal itu sesuai dengan teori implementasi kebijakan publik dari Grindle (1980) dalam Agustino (2014:155), yaitu bahwa “setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai, dan seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.” Sebagaimana juga hal itu sesuai dengan pendapat yang disampaikan Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2014:142), bahwa: “kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga maka memang agak sulit merealisasikan kebijakan hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.”

d. Pelaksana Program

Pelaksana program yang memiliki kompetensi dan kapabilitas yang memadai terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya akan sangat mendukung keberhasilan implementasi program, demikian sebaliknya apabila pelaksana program tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya jelas akan menghambat implementasi program bahkan membuat program tersebut gagal diimplementasikan. Berdasarkan hasil analisa, maka peneliti menilai para pelaksana atau pelaku Program BSPS ini cukup kompeten dan kapabel dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, karena dengan waktu pelaksanaan program yang terbatas, maka pastinya pelaksanaan program ini sangat menuntut adanya pelaksana program yang memiliki kemampuan yang memadai sehingga program ini bisa berhasil dilaksanakan. Adapun para pelaksana program BSPS ini diantaranya yaitu SKPD yang membidangi perencanaan daerah yang sudah memiliki pengalaman yang cukup lama dalam mengurus masalah bantuan rehabilitasi rumah bagi warga miskin. Pelaksana lainnya yaitu Kepala Desa yang sudah teruji dalam kepemimpinannya selama menjabat sebagai Kepala Desa, dimana sudah terbiasanya menerima dan melaksanakan berbagai program bantuan dari pemerintah. Fasilitator juga merupakan individu yang memiliki kompetensi dan kapabilitas yang cukup dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dimana ia sudah memiliki pengalaman

di bidang pendampingan masyarakat dan berijazah minimal Sarjana Strata Satu (S1). Selain itu pelaksana program yang turut mendukung keberhasilan program ini adalah toko penyedia bahan bangunan, yaitu terkait dengan kemampuannya untuk mensuplai bahan-bahan bangunan kepada penerima bantuan. Maka yang terpenting adalah toko memiliki ketersediaan stok material yang mencukupi untuk mensuplai seluruh kebutuhan material penerima bantuan dan memiliki sarana angkut yang memadai sehingga tidak terjadi keterlambatan suplai bahan bangunan. Karena keterlambatan suplai material akan menghambat proses pelaksanaan konstruksi bangunan oleh penerima bantuan. Apa yang peneliti sampaikan tersebut sesuai dengan teori implementasi kebijakan dari Grindle (1980) dalam Agustino (2014:155) yang mengemukakan bahwa “dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung oleh adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan kebijakan tersebut.” Hal itu senada dengan pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2014:142) yang menyatakan bahwa: “manusia merupakan sumberdaya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi kebijakan. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang telah diisyaratkan oleh kebijakan. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya manusia itu nihil maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.”

Sedangkan faktor yang mendukung keberhasilan implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari segi *context of policy*, diantaranya yaitu:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat

Yaitu aktor atau pelaksana program yang memiliki kewenangan dimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Dengan keterbatasan waktu pelaksanaan program maka hal itu menjadi penting untuk diperhatikan. Hal itu sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Grindle (1980) dalam Agustino (2014:156) bahwa “dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu

implementasi kebijakan. Bila hal itu tidak diperhitungkan dengan baik kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan tidak berhasil." Sebagaimana dalam implementasi Program BSPS ini sangat diperlukan pengaruh (kekuasaan) dan kepentingan juga strategi dari para pelaku program khususnya dari SKPD, Camat, dan Kepala Desa, sehingga dapat mendukung jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Karena ketika bantuan sudah turun dan bahan-bahan material sudah disuplai oleh toko/ penyedia bahan bangunan, penerima bantuan tidak segera memulai pekerjaan konstruksi bangunan rumahnya, dengan berbagai alasan yang dikemukakan. Saat seperti itulah dibutuhkan kekuasaan pejabat yang berwenang atau aktor yang terlibat dalam program ini seperti dari SKPD, Camat, maupun Kepala Desa agar masyarakat penerima bantuan mau mematuhi perintah mereka untuk segera memulai pekerjaan konstruksi bangunan rumahnya karena waktu yang tersedia untuk program ini cukup singkat. Karena kalau hanya dari fasilitator saja yang memberikan himbuan kepada mereka (penerima bantuan) kadang mereka masih menyepelekan dan tidak mau mematuhi. Hal itu sesuai dengan pendapat Edward III dalam Agustino (2014:152) yaitu "pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Dan ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan." Dalam implementasi program ini maka kewenangan secara formal ada pada SKPD, Camat dan Kepala Desa. Dan di dalam implementasinya di lapangan kewenangan mereka terbukti dapat mendukung keberhasilan program ini, dimana penerima bantuan lebih patuh kepada perintah yang disampaikan oleh mereka dari pada oleh fasilitator.

Selain itu, keberhasilan implementasi kebijakan juga didukung oleh adanya kepentingan dimana kebijakan itu diimplementasikan. Diantara kepentingan yang turut mendukung adalah kepentingan dari pihak desa sebagai upaya pemerintah desa untuk menyejahterakan warganya dari aspek pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni. Selain itu juga kepentingan pribadi Kepala Desa

sebagai bentuk pencitraan kepada warganya. Keberhasilan program BSPS ini akan memberikan penilaian positif dari masyarakat bagi Kepala Desa tersebut sehingga akan meningkatkan citranya. Dan itu berdampak terhadap dukungan warga ketika Kepala Desa tersebut ingin mencalonkan lagi sebagai Kepala Desa pada periode selanjutnya. Adapun kepentingan Pemerintah Kabupaten Kediri, karena keberhasilan Program BSPS tahun 2015 akan berpengaruh terhadap pengajuan BSPS di tahun 2016. Mereka sangat berharap Program ini berhasil diimplementasikan di Kabupaten Kediri agar di tahun berikutnya Kabupaten Kediri memperoleh BSPS lagi. Beberapa kepentingan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Program BSPS ini sesuai dengan teorinya Merilee S. Grindle (1980) dalam Agustino (2014:154) yang berpendapat bahwa “suatu kebijakan itu dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, maka hal itulah yang perlu diketahui lebih lanjut”.

Sedangkan strategi yang dilakukan oleh para aktor yang terlibat untuk mendukung keberhasilan implementasi program ini diantaranya yaitu:

*Yang pertama*, adanya komunikasi dan koordinasi yang baik diantara para pelaku BSPS. Komunikasi yang baik terutama diantara para pelaku BSPS khususnya di tingkat pelaksana kebijakan sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan program ini di lapangan. Dalam hal implementasi Program BSPS maka komunikasi dan koordinasi antara Tim Teknis, Koordinator Kabupaten, Fasilitator, Toko penyedia bahan bangunan, bank/pos penyalur, dan penerima bantuan merupakan faktor yang turut mendukung keberhasilan implementasi Program BSPS di lapangan. Dimana dengan komunikasi dan koordinasi yang baik setiap informasi yang muncul dapat disampaikan, dan setiap permasalahan yang muncul dapat dicarikan solusi atau jalan keluar. Sehingga tidak ada salah pemahaman diantara para pelaksana BSPS dan tidak ada kesulitan atau masalah yang sampai mengalami jalan buntu. Hal itu sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2014:144) yaitu bahwa: “Koordinasi

merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, dan begitu pula sebaliknya.”

*Kedua*, dengan cara monitoring dan pembinaan secara teratur dan terus menerus kepada penerima bantuan yang dilakukan oleh SKPD, Kepala Desa dan Fasilitator, sehingga bila ada hambatan atau masalah langsung dapat dicarikan solusinya. Bahkan untuk Kepala Desa dan fasilitator hampir setiap hari berkeliling ke lokasi pembangunan guna melakukan pendampingan agar penerima bantuan dapat menyelesaikan pembangunan tepat pada waktunya. Sebagaimana pendapat Agustino (2014:148) yang mengatakan bahwa “kemampuan berinteraksi antar lembaga atau individu untuk menyelesaikan implementasi kebijakan menjadi indikasi penting keberhasilan kinerja kebijakan publik.”

*Ketiga*, adanya kerjasama antar pelaku BSPS. Kerjasama yang baik khususnya dalam mengatasi masalah yang menjadi penghambat atau kendala pelaksanaan program akan sangat bagus dilakukan, karena dapat mendukung keberhasilan implementasi program. Dalam hal ini kerjasama dilakukan oleh Kepala Desa, penyedia bahan bangunan, dan penerima bantuan, sebagai upaya untuk membantu masalah yang dihadapi penerima bantuan terkait keterbatasan (kekurangan) sumberdaya material bahan bangunan. Kerjasama tersebut dalam bentuk pemberian pinjaman kepada penerima bantuan oleh toko/penyedia bahan bangunan untuk penerima bantuan yang mengalami kekurangan material dalam menyelesaikan pekerjaan konstruksi bangunan rumahnya. Sehingga permasalahan yang ada dapat teratasi dan proses pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah dapat berjalan dengan baik. Hal itu sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Edward III dalam Agustino (2014:153) bahwa “kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.”

*Keempat*, mekanisme penyaluran dana. Dalam hal ini adalah

penyaluran dana ke penerima bantuan dilakukan tidak dalam bentuk tunai, namun penerima bantuan menerima dana dalam bentuk tabungan, sehingga kemungkinan penggunaan dana untuk keperluan lain selain membangun dapat dihindari. Selanjutnya untuk pembelian bahan bangunan cara pembayarannya juga melalui pemindahbukuan dari rekening penerima bantuan ke rekening toko/penyedia bahan bangunan yang dilakukan oleh bank/pos penyalur, Jadi, semua perpindahan dana itu dilakukan oleh bank, sehingga kemungkinan ada penyelewengan dana dan kecurigaan publik terhadap adanya unsur korupsi dapat dihindari. Cara penyaluran dana tersebut dirasa sangat tepat dan tidak menimbulkan keruwetan dalam penyaluran dana, sehingga peneliti menilai hal tersebut sebagai salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Program BSPS ini.

b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa

Dalam implementasi Program BSPS di Desa Sumberjo, maka karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa dalam hal ini lembaga yang tepat adalah Pemerintahan Desa Sumberjo yaitu Kepala Desa beserta seluruh jajaran perangkatnya. Dalam pelaksanaan Program BSPS ini peneliti menilai mereka sangat kompak dan sangat peduli terhadap kondisi penerima bantuan sehingga apa yang mereka lakukan dapat mendukung keberhasilan program. Beberapa perangkat desa dalam hal ini kepala dusun mengkoordinir kegiatan gotong royong dalam rangka pembongkaran rumah (lama) dan pekerjaan atap yaitu memasang kayu dan genteng untuk rumah baru. Hampir setiap hari kepala desa yang juga sebagai anggota Tim Teknis melakukan monitoring ke tempat penerima bantuan secara bergantian, sehingga bisa mengetahui kendala-kendala apa saja yang menghambat pelaksanaan pembangunan mereka, dan berusaha sesuai kemampuan untuk membantu dan mencari jalan keluar. Dan apabila ada warga yang agak susah diatur maka akan dilakukan pembinaan. Sikap positif yang ditunjukkan Pemerintah Desa Sumberjo sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Program BSPS di desa tersebut. Dimana pihak dari Pemerintahan Desa Sumberjo baik Kepala Desa maupun perangkat desa lainnya menunjukkan sikap penerimaan yang baik terhadap jalannya proses

implementasi program ini, dan mereka menunjukkan perilaku yang mendukung keberhasilan Program BSPS ini. Hal itu sesuai dengan pendapatnya Grindle dalam Agustino (2014:156), yang menyatakan bahwa “lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya.” Sebagaimana pendapat serupa dari Van Metter dan Van Horn (2014:143) bahwa: “pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.”

### **3. Faktor-Faktor Yang Menghambat**

Adapun faktor-faktor yang menghambat implementasi Program BSPS di Desa Sumberjo dari segi *content of policy*, antara lain:

#### **a. Letak Pengambilan Keputusan**

Program BPS ini merupakan kebijakan yang sifatnya “*top down*” dimana semua ketentuan yang menetapkan adalah pusat dalam hal ini adalah berada di tingkat kementerian. Namun pada tingkat penerima bantuan, sebelum bantuan benar-benar disalurkan, ada tahapan penyiapan masyarakat, dengan tujuan saat bantuan diterima oleh masyarakat, maka mereka telah benar-benar siap untuk melaksanakan program ini sehingga harapannya dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan Program BPS ini di lapangan. Namun pada parakteknya tahapan penyiapan masyarakat ini kurang berjalan maksimal karena keterbatasan waktu pelaksanaan program. Sehingga dalam implementasinya terdapat beberapa kendala, karena masyarakat belum benar-benar siap melaksanakan program ini terutama dari aspek ketersediaan swadaya.

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2014:145), yaitu “sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan



dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan diimplementasikan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.”

b. Keterbatasan sumberdaya yang digunakan

Keterbatasan sumberdaya akan sangat mengganggu jalannya pelaksanaan kebijakan, sebagaimana pendapat Grindle (1980) dalam Agustino (2014:155) yang menyatakan bahwa “pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.” Pendapat tersebut benar adanya, dimana pada implementasi Program BSPS ini terdapat beberapa kendala sehingga menghambat pelaksanaan program, yang disebabkan oleh karena sumberdaya yang ada kurang mendukung pelaksanaan program dengan kata lain ada keterbatasan pada sumberdaya yang digunakan.

Adapun sumberdaya yang digunakan pada implementasi program ini yaitu ada tiga bentuk, diantaranya sumberdaya waktu, manusia (pekerja), dan materi (finansial). Dimana waktu yang disediakan untuk pelaksanaan program ini yaitu Program BSPS Tambahan ini cukup ketat (sangat terbatas), yaitu hanya sekitar satu bulan. Belum lagi ditambah dengan adanya musim hujan, tentunya cukup menghambat penyelesaian konstruksi bangunan. Akhirnya banyak penerima bantuan yang belum selesai pekerjaan konstruksi bangunannya pada akhir tahun 2015.

Selain itu juga keterbatasan sumberdaya manusia dalam hal ini adalah ketersediaan pekerja (tukang) yang tidak mencukupi atau tidak sebanding antara jumlah rumah yang dibangun dengan jumlah pekerja (tukang) yang tersedia. Hal itu disebabkan oleh waktu pelaksanaan pembangunan yang bersamaan, di mana dalam satu desa ada 68 titik pembangunan rumah. Adapun keterbatasan sumberdaya finansial dalam hal ini adalah keterbatasan swadaya penerima bantuan. Oleh karena informasi mengenai program ini cukup mendadak dan waktu pelaksanaan program yang terbatas, maka penerima bantuan banyak yang belum siap dalam hal swadaya yaitu keterbatasan finansial untuk upah tukang dan pembelian

kekurangan material.

Sedangkan faktor yang turut menghambat keberhasilan implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari segi *context of policy*, yaitu tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana program. Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana dapat menjadi faktor yang menghambat pada pelaksanaan Program BSPS ini di Desa Sumberjo karena sebagian besar penerima bantuan menunjukkan sikap ketidakpatuhan dan respon yang kurang bagus dalam proses implementasi program ini. Sehingga sikap mereka dapat menghambat pelaksanaan program yang akhirnya pekerjaan konstruksi bangunan rumah mereka tidak bisa selesai pada batas waktu yang ditetapkan. Adapun bentuk ketidakpatuhan penerima bantuan ditunjukkan dengan sikap yang tidak segera menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumahnya yang disebabkan oleh adanya kepercayaan masyarakat terhadap hari baik atau itung-itungan Jawa dalam memulai atau mengawali kegiatan membangun rumah atau untuk menaikkan atap/genting. Mayoritas penduduk Desa Sumberjo merupakan suku Jawa, dimana kepercayaan masyarakat terhadap adat dan budaya Jawa masih cukup kental. Termasuk salah satunya kepercayaan terhadap hari baik dalam memulai pekerjaan membangun rumah dan menaikkan genting (atap). Sehingga peneliti menilai hal itu cukup menghambat pelaksanaan program karena harus menunggu hari yang dinilai baik dulu baru mereka mau memulai proses pembangunan rumahnya. Meskipun dari para pejabat pelaksana sudah memberikan instruksi dan pembinaan, namun beberapa penerima bantuan memiliki keyakinan yang cukup kuat sehingga mengabaikan perintah atau ketentuan yang ada. Hal tersebut sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dalam Agustino (2014:148) yaitu bahwa “implementasi suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila di tingkat masyarakat, warga memiliki sumber-sumber dan sikap yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka. Ada semacam kearifan lokal yang dimiliki warga yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan implementasi kebijakan publik. Dan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh sikap dan sumber yang dimiliki oleh warga masyarakat.”

Selain itu kepatuhan dan respon yang kurang bagus ditunjukkan oleh penerima bantuan ketika banyak diantara mereka yang menambah volume bangunan rumahnya. Hal itu tidak dilarang asalkan mereka bisa menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang ditentukan. Namun karena waktu yang disediakan

untuk pelaksanaan program ini terbatas, sehingga agar pembangunan bisa selesai pada batas waktu yang ditetapkan maka perlu diimbangi dengan jumlah pekerja (tukang) yang mencukupi. Namun prakteknya di lapangan, hal itu rata-rata tidak dilakukan oleh penerima bantuan, sehingga pekerjaan konstruksi bangunan tidak bisa selesai tepat waktu.

Sehingga dapat dikatakan tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana merupakan hal yang penting untuk diperhatikan jika ingin kebijakan yang ditawarkan berhasil untuk diimplementasikan. Sebagaimana pendapat Grindle dalam Agustino (2014:156) yaitu: “hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.”

#### **4. Dampak Implementasi Program Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

Adapun manfaat atau dampak positif dari implementasi program ini bagi penerima bantuan berdasarkan data yang peneliti dapatkan maka dapat disajikan secara ringkas adalah: (1) mengurangi beban hidup masyarakat miskin, karena mereka tidak lagi memiliki tanggungan untuk membuat rumah, (2) Secara psikologis meningkatkan rasa percaya diri karena rumahnya lebih bagus dari sebelumnya, (3) meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin karena dana atau penghasilan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan membangun rumah bisa dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup lainnya, seperti untuk dana pendidikan, modal usaha, serta peningkatan kualitas sandang dan pangan, (4) dengan kondisi rumah yang memenuhi kriteria rumah layak huni, maka akan meningkatkan kualitas kesehatan, dan (5) memberikan rasa aman bagi penghuninya, (6) berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan.

Dimana dampak program ini selain terpenuhinya sandang, pangan, perumahan, lapangan kerja, dan untuk jangka panjang dapat menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan, keamanan, psikologis, dan sosial masyarakat penerima bantuan. Dan semua itu merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam kesejahteraan, sebagaimana pendapat Goulet dalam Theresia, *et.al.*, (2014:2)

yang mengemukakan bahwa sedikitnya ada tiga nilai yang terkandung di dalam kesejahteraan, yaitu:

- a. Tercapainya swasembada, dalam arti kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar hidupnya yang mencakup: pangan, sandang, perumahan/pemukiman, pendidikan dasar, keamanan, kesehatan, rekreasi, dll.
- b. Peningkatan harga diri, dalam arti berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri dan tidak bergantung kepada atau ditentukan oleh pihak lain, terlepas dari penindasan fisik maupun ideologi, dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan mereka.
- c. Diperolehnya suasana kebebasan, dalam arti adanya kesempatan dan kemampuan untuk mengembangkan dan untuk memilih alternatif-alternatif yang dapat dan boleh dilakukan untuk perbaikan mutu-hidup atau kesejahteraan yang terus menerus bagi setiap individu sebagai warga masyarakat, tanpa adanya rasa takut dan tekanan dari pihak-pihak lain.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulannya adalah:

1. Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sumberjo Tahun 2015 bila dianalisa dengan menggunakan teori implementasi kebijakan model Merilee S. Grindle maka keberhasilan implementasi kebijakan ditinjau dari segi *content of policy*, dipengaruhi oleh: (1) kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi; (2) tipe manfaat (dampak positif program); (3) derajat perubahan yang ingin dicapai; (4) letak pengambilan keputusan; (5) pelaksana program; dan (6) sumberdaya yang digunakan. Sedangkan dari segi *context of policy*, keberhasilan implementasi program dipengaruhi oleh: (1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat; (2) karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa; serta (3) tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana.
2. Dalam implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sumberjo terdapat faktor-faktor yang mendukung

dan menghambat implementasi program. Adapun faktor-faktor yang mendukung implementasi program dari segi *content of policy*, yaitu: (1) kepentingan yang mempengaruhi; (2) tipe manfaat (dampak positif program); (3) derajat perubahan yang ingin dicapai; dan (4) pelaksana program. Sedangkan faktor-faktor yang mendukung implementasi program dari segi *context of policy*, yaitu: (1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat; serta (2) karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Adapun faktor-faktor yang menghambat implementasi program dari segi *content of policy*, yaitu: (1) letak pengambilan keputusan; dan (2) sumberdaya yang digunakan. Sedangkan faktor yang menghambat implementasi program dari segi *context of policy*, yaitu tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana.

3. Dengan terpenuhinya kebutuhan akan perumahan maka masyarakat penerima bantuan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup lainnya seperti pendidikan, dan kesehatan, atau peningkatan kualitas sandang dan pangannya sehingga hal itu meningkatkan mutu atau taraf hidupnya. Selain itu dengan dimilikinya rumah yang layak huni maka akan meningkatkan kualitas keamanan, kesehatan lingkungan, dan secara psikologis berdampak pada peningkatan rasa percaya diri dan tentunya juga meningkatkan status sosialnya. Dan untuk jangka panjang akan menurunkan angka kemiskinan. Dimana dari semua dampak tersebut merupakan faktor-faktor yang menjadi syarat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa implementasi program BSPS ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **E. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu secara substansi maupun finansial, perkenankan penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof.Dr. Ir. H. Zaenal Fanani, MS., selaku Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Koperasi Kediri.
2. Rektor, Wakil Rektor I dan II Universitas Kahuripan Kediri.
3. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Kahuripan Kediri.

4. Para Dosen, Pegawai dan Staf Administrasi Universitas Kahuripan Kediri.
5. Kepala Desa Sumberjo, yang telah memberikan izin penelitian.
6. Para informan dalam penelitian ini, yaitu dari pihak Bappeda, Koordinator Kabupaten, Fasilitator, dan penerima bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu memberikan informasi atau data yang peneliti butuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi, 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bogdan, R. C. dan Biklen S. K. 1993. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamdi, Muchlis, 2015. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ismail, Munawar, *et.al.*, 2014. *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Inggriani, 2015. Evaluasi Pelaksanaan Program BSPS di Kabupaten Dharmasraya, *Jom FISIP*. 2 (2): 1-13.
- Kaelan dan Ahmad Zubaidi, 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Lincoln, Yvonna S. dan Egon G. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Newbury Park, CA: Sage Publication.
- Miles, Huberman, Saldana, 2014. *Kualitatif Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*. United States of America: Sage Publication Inc.
- Moleong, Lexy J. 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Arisetyanto, *et.al.*, 2015. *Etika Berwarganegara: Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Penjelasan Teknis Peraturan Menteri PUPR No. 39/PRT/M/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 39/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri



- No 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- Purwadarminta, W.J.S., 1996, *Pengertian Kesejahteraan Manusia*. Bandung: Mizan.
- Qomaria, Afifa, 2015. Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Meri Kota Mojokerto. *Kebijakan dan Manajemen Publik* 3 (1): 1-7.
- Sulistiyo, Mudji, *et.al.*, 2013. Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Administrasi Reform* 1 (1): 328-341.
- Rahma, Nieke, 2011. "Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional pada Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" melalui <http://niekerahma.blogspot.co.id/2011/02/pengaruh-aspek-ketahanan-nasional-pada.html> (12/03/16).
- Rubyantho, Haryati dan Nunung Unayah, 2014. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat, *SOSIO KONSEPSIA*. 4 (1): 311-330.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sriwahyuntari (*ed.*), 2014. *UUD 1945 dan Amandemen*. Yogyakarta: Gradien Mediatama.
- Suharto, Edi. 2013. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suradi, 2012. Studi Evaluasi Dampak Kebijakan Sosial: Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Bagi Keluarga Miskin di Kota Banjarmasin. *Sosiokonsepsia*, 17 (02): 205-220.
- Suradinata, Ermaya, 2005. *Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI*. Jakarta: Suara Bebas.
- Theresia, Aprillia, *et.al.*, 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Wan, *et.al.*, 2003. *Daya Tahan Bangsa*. Jakarta: Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional, Pascasarjana UI.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.